

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MUBADALAH*
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

INDAH RAMADHONIYAH ADRI

NPM : 1721020351

Jurusan: Siyasah Syar'iiyyah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF MUBADALAH
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

INDAH RAMADHONIYAH ADRI

NPM : 1721020351

Jurusan: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh anggota masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan bentuk tindakan afirmatif (*affirmative action*) untuk mendukung keterwakilan perempuan di bidang politik atau pemerintahan. Namun, pada kenyataannya di Pemilu terakhir pada tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam Pemilu untuk menduduki jabatan politik masih belum mencapai 30% (tiga puluh persen). Berkenaan dengan itu perspektif *mubadalah* sebagai alternatif penafsiran kontekstual agama dalam berkeadilan gender menjadi penting untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berwawasan gender dengan dasar keyakinan agama.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap kepemimpinan politik perempuan dan bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dilihat dari perspektif *mubadalah*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan relevansinya perspektif metode *mubadalah* terhadap kepemimpinan politik perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana cara kerja dari metode ini adalah menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin term pembahasan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 14 pasal yang menjelaskan tentang pencalonan perempuan memiliki hak sekurang-kurangnya 30% dalam seluruh bidang jabatan politik dan menjadi persyaratan untuk Partai Politik dalam mengikuti Pemilu. Sedangkan, dalam perspektif *mubadalah*, kepemimpinan politik perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki korelasi dengan Qs. At-Taubah ayat 71 yang menjadi dasar baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, bahwa setiap warga negara, perempuan dan laki-laki, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan perpektif *mubadalah* dalam mendukung hak perempuan untuk menduduki jabatan politik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Indah Ramadhoniya Adri**

NPM : **1721020351**

Prodi : **SIYASAH SYAR'IYYAH (HUKUM TATA NEGARA)**

Fakultas : **SYARIAH**

Judul : **Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia (Analisis Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

NIP.196706041997032004

Pembimbing II

Drs. Henry Wansyah, M.A.

NIP. 195812071987031003

Ketua Jurusan Siyasaah Syar'iyyah

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia (Analisis Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)"** disusun oleh **Indah Ramadhoniya Adri, NPM. 1721020351**, Program Studi: **Siyasah Syar'iyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frengki, M.S.i

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. KH. Khairuddin Tahmid., M.H.
NIP. 1962102199930311002.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Indah Ramadhoniyah Adri**
NPM : **1721020351**
Prodi : **SIYASAH SYAR'IIYAH (HUKUM TATA NEGARA)**
Fakultas : **SYARIAH**
Judul : **Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia (Analisis Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Drs. Henry Iwansyah, M.A.

NIP.196706041997032004

NIP. 195812071987031003

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyah

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia (Analisis Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”** disusun oleh **Indah Ramadhoniya Adri**, NPM. 1721020351, Program Studi: **Siyasah Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frengki, M.S.i (.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH (.....)

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. KH. Khairuddin Tahmid., M.H.

NIP. 1962102199930311002.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Kepada kedua orang tua saya KH. Moh. Adri Abdul Manaf (Alm.) dan Hj.Chairani R., kepada kakak-kakak saya Kak Nana, Ayuk Apik , Kiyay Rohim, Abang Frenki, Kak Iqbal, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
3. Rekan-rekan kelas unggulan angkatan kedua (2017) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. UKMF MCC Fakultas Syari'ah yang telah menjadi wadah saya dalam mengkaji ilmu hukum teori maupun praktek.
5. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag selaku Pemimbing Akademik I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap penyelesaian skripsi ini dan memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
6. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku Pembimbing Akademik II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bantuan, bimbingan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh keluarga besar dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Desember 1999.

Anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan KH. Moh. Adri Abd. Manaf (alm.) dan Dra.Hj. Chairani R.

Jenjang pendidikan penulis antara lain;

1. TK Al-Azhar 2 lulus pada tahun 2005
2. SD Al-Azhar 2 lulus pada tahun 2011
3. SMPN 23 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014
4. SMAN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Siyasah Syar'iyah, Terdaftar Pada Tahun 2017.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah.
4. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syar'iyah.
6. Kedua orang tua saya KH. Moh. Adri Abdul Manaf (Alm.) dan Hj. Chairani R.
7. Segenap rekan-rekan angkatan 2017, khususnya kelas unggulan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah yang selalu membantu dan *mensupport* penulis dalam melakukan penelitian.
9. Segenap rekan-rekan UKMF-MCC Fakultas Syari'ah yang selalu menjadi wadah dalam berproses, berdiskusi dan berkeluh kesah.

10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan ini
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *ukhwah islamiyyah*.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2020

Indah Ramadhoniya Adri
NPM. 1721020351



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II MUBADALAH DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

A. Latar Belakang Istilah Mubadalah.....	15
B. Penerapan Metode <i>Mubadalah</i> dalam Penafsiran	24
C. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Ruang Domestik maupun Publik Perspektif <i>Mubadalah</i>	37
1. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Ruang Domestik Menurut <i>Mubadalah</i>	38
2. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Ruang Publik Menurut <i>Mubadalah</i>	46
D. Telaah Pustaka.....	52

BAB III KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017

A. Tinjauan Umum Kedudukan Perempuan di Indonesia.....	59
B. Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia	68
C. Ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ..	73

BAB IV ANALISA DATA

A. Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017	80
--	----

B. Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif <i>Mubadalah</i>	87
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi ini, terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MUBADALAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)”**, untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa peristilahan dalam judul penelitian ini dengan berlandaskan teori ataupun sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.¹ Kepemimpinan merupakan inti daripada suatu organisasi karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi. Jadi, maksud penulis dari kepemimpinan politik perempuan adalah peran-peran di luar domestik yang dimiliki perempuan dalam keahlian atau potensial sebagai pemimpin pada posisi puncak dalam sektor publik yang mampu turun di dunia politik

¹Thoha, M. *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.9.

untuk mewakili maupun memimpin suatu daerah. Baik di bidang pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Keahlian atau potensi dalam jiwa seorang pemimpin tidak semata-mata berkaitan dengan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.²

2. *Mubadalah* adalah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.³ *Mubadalah* merupakan prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan manusia antara mereka, keadilan, serta kemaslahatan bagi keduanya. Sehingga, yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, melainkan bekerja sama dan saling tolong-menolong. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama⁴. Prinsip *mubadalah*, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antara anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa antar anggota komunitas, atau antar warga negara. Kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki.

²Darojatun, Asih. *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017) h.1

³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), h. 60.

⁴*Ibid*, h.530

3. Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang ini telah diundangkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017. Di dalam undang-undang ini terdapat 14 pasal yang mengatur tegas mengenai kuota keterwakilan perempuan yang sedikitnya 30% dalam keanggotaan di bidang politik. Misalnya, dalam keanggotaan KPU hingga keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Undang-undang ini menjadi landasan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik.

Berdasarkan uraian istilah di atas maka ditegaskan bahwa judul tersebut adalah sebuah penelitian untuk menganalisis kepemimpinan politik perempuan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan metode *mubadalah*.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam kehidupan sosial serta memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja dan beramal menurut kemampuan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada keduanya. Oleh karena itu, laki-laki maupun perempuan

berkewajiban untuk saling membantu, membina dan mengasihi antara satu dengan lainnya.⁵

- b. Kajian tentang Kepemimpinan Politik Perempuan penting dilakukan untuk memperluas pemahaman dan wawasan serta merefleksikan nilai-nilai ketiganya dalam kehidupan sosial.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu jurusan Siyasah Syar'iyah atau Hukum Tata Negara. Selain itu, referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang dan didukung dengan berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang perjalanan Indonesia dari zaman penjajahan, pergerakan dan perjuangan menuju Indonesia merdeka sampai saat ini tentu menjadi jalan panjang pula atas pengabdian dan perjuangan serta peran putra putri bangsa. Seperti yang tertuang dalam kesepakatan yang kita kenal dengan wujud Sumpah Pemuda, maka dapat kita cermati bahwa kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum*

⁵Ani, Fitria. "Sosial dan Gender." *Jurnal Masyarakat* Vol.2 No.5 (2016) h.3.

*dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*⁶

Menurut Robert A. Dahl sistem politik adalah “... *as any persistent pattern of human relationship that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority*”.⁷ Dalam sebuah sistem politik, isu-isu penting yang dibicarakan meliputi sumber kekuasaan negara, pelaksanaan kekuasaan negara.⁸ Dalam sistem politik itu sendiri tak lain ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang memunjukkan suatu proses yang langgeng.⁹ Dalam cakupan ilmu politik (*political science*) dan studi politik (*political study*) yang begitu pentingnya adalah hak asasi manusia (HAM), yang berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan tentang demokrasi modern yang bersumber dari liberalisme. Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*) dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*).¹⁰

Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa sistem politik dan hak asasi manusia (HAM) saling berkaitan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak atas dirinya, begitu juga dengan perempuan memiliki hak untuk terjun dalam dunia per-politikan. Realitas bahwa sudah banyak tokoh perempuan yang menjadi pemimpin, baik sebagai presiden maupun sebagai perdana menteri di negara-

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2 Tentang Kewajiban Warga Negara.

⁷ Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik di Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h.11

⁸ Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Progresif* (Yogyakarta: KauKaba Dipantara, 2015) h.121.

⁹ Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik di Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h.12

¹⁰ Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.177.

negara muslim, seperti Pakistan, dan Banglades. ¹¹Di Indonesia dengan mudah ditemukan sederetan figur pemimpin perempuan yang telah mengukir kesuksesan sebagai pemimpin mulai dari level terendah sebagai RT sampai yang paling tinggi, presiden pun sudah dibuktikan oleh kaum hawa ini.

Perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh anggota masyarakat dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial. Jika semua perempuan dan laki-laki memiliki kualitas keilmuan, keterampilan dan juga yang tak kalah pentingnya, kualitas spiritual (keimanan), maka gambaran masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur akan lebih cepat terwujud.¹² Kesempatan untuk perempuan Indonesia di bidang politik pemerintahan tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Sudah cukup banyak landasan hukum yang dibuat baik formal maupun tidak formal, berupa undang-undang, aturan dan konvensi di tingkat nasional maupun internasional yang membahas tentang peranan/penyertaan hak antara laki-laki dan perempuan pada semua bidang salah satunya adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diatur bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan sedikitnya 30%, kemudian dalam pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan

¹¹“Wanita Muslim yang Menjadi Pemimpin di Dunia”, (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita_muslim_yang_menjadi_pemimpin_di_dunia (diakses pada tanggal 25 Juni 2020)

¹²Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) h.29.

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.¹³

Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, seperti yang diketahui hak setiap warga negara dalam politik pemerintahan adalah hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih bisa digarisbawahi adalah keaktifan dalam pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak kepada seluruh warga negara. Akan tetapi realita yang terjadi bahwa semua itu belumlah cukup untuk berfungsi sebagai piranti kekuatan yang menghantarkan kaum perempuan menjadi mitra sejajar dengan kaum laki-laki untuk berpolitik dan menduduki jabatan politik. Meskipun iklim yang berkembang mulai memberikan peluang, masih banyak aspek berkaitan dengan faktor-faktor kultural dan sosial yang masih menghambat pengembangan perempuan.

Hal ini terbukti dengan data Pemilu dari tahun ke tahun belum pernah menunjukkan keterwakilan perempuan mencapai hingga 30%. Perempuan-perempuan yang duduk di jabatan politik pun belum memberi pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan, hal ini terbukti dengan banyaknya kebijakan yang masih diskriminatif perempuan. Sebagai contoh, Komnas Perempuan pernah mencatat ada 342 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Perda-perda itu umumnya mengatur soal bagaimana perempuan harus berpakaian, pemisahan ruang publik, dan penerapan jam malam. Di tingkat

¹³ Undang-Undang Dasar No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

legislatif, UU yang dihasilkan juga tidak kalah diskriminatif. Salah satu contoh adalah UU No. 44/2008 tentang Pornografi yang terkesan mengkriminalkan tubuh perempuan. Makin tersingkirnya perempuan dalam dunia politik ini merupakan fenomena miris karena menciderai amanat undang-undang. Bukan hanya itu, jaminan keterwakilan politik perempuan juga tercantum dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* dan Konvensi Hak-Hak Politik Wanita dalam Piagam PBB.

Salah satu alasan klasik yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia adalah soal budaya patriarki, yakni perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (privat) sementara laki-laki wilayah publik. Ketertinggalan perempuan di panggung politik berimplikasi terhadap lahirnya kebijakan yang tidak sensitif gender karena para pengambil kebijakan didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam negara demokrasi, keterlibatan/partisipasi perempuan dan laki-laki pada posisi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan akan berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua tingkatan secara akurat dan akan terjadi pencapaian tujuan untuk menciptakan keadilan.

Berdasarkan pengamatan secara faktual, terlihat bahwa perempuan masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek dalam segala hal. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya berasal dari budaya patriarki yang telah berhasil mengerdilkan jiwa dan mengikis kepercayaan diri kaum perempuan Indonesia. Perempuan dulu enggan untuk bersekolah tinggi, akibatnya kualitas pendidikan menjadi rendah dan ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan yang sulit terpecahkan karena kurang berdayanya perempuan itu

sendiri. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya daya saing dalam meraih peluang untuk menduduki posisi-posisi strategis pada lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun publik. Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.

Menyimak sejarah sejak zaman Rasulullah SAW, hingga masa kekhalifahan, semua yang terpilih menjadi khalifah adalah seorang laki-laki. Muncul pertanyaan apakah pada waktu itu tidak ada perempuan yang cerdas? jawabannya adalah ada. Seperti: Siti Aisyah, istri nabi misalnya, beliau adalah seorang perempuan yang alim, ahli syair, dan ahli pidato yang ulung. Beliau telah meriwayatkan hadits nabi sebanyak 2.210 buah hadits. Setelah nabi wafat, Aisyah sebagai seorang penasihat para sahabat-sahabat nabi yang sering datang ke rumah untuk meminta pendapat.¹⁴ Kalau dipertimbangkan dari kecerdasan dan prestasinya, ia mampu. Dari kedekatan dengan Nabi, ia merupakan ahli waris sah yang berhak menduduki jabatan sebagai khalifah untuk meneruskan perjuangan Nabi, tetapi tidak. Ia tidak memanfaatkan kharisma sang suami untuk menjadi khalifah. Malah yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah atau menantu dari Rasulullah.

¹⁴ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.60-61.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kepemimpinan politik perempuan di Indonesia menurut perspektif *mubadalah*, yaitu sebuah terminologi yang digunakan sebagai metode pemaknaan teks-teks agama agar selaras dengan perspektif kemitraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kepemimpinan politik perempuan di Indonesia yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianalisis menggunakan perspektif *mubadalah*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap kepemimpinan politik perempuan ?
2. Bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dilihat dari perspektif *mubadalah* ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia yang terdapat di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 529

2. Untuk mengetahui perspektif metode *mubadalah* mengenai kepemimpinan politik perempuan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai kepemimpinan politik perempuan di Indonesia serta dapat menjadi bahan refrensi bagi pengembangan wawasan maupun bahasan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khazanah, pengembangan ilmu, pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan serta refrensi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan politik perempuan dan menjadi sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara, sekaligus menjadi refrensi bagi para peneliti berikutnya dengan persoalan yang sama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, guna menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui posedur aplikasi ilmiah secara sistematis,¹⁶ tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, dan

¹⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), h.329.

penelitian lainnya. Sebagai cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan¹⁷, serta membahas dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori, pendapat, serta hukum positif yang ada, yang memiliki hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁹ Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan terkait materi yang penulis pilih.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier, yaitu :

¹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), h.2.

¹⁸Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h.38.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet. ke VII, h.105.

a. Sumber Primer

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara meneliti, menelaah dan memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan sebagai sumber data primer.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan data Sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.²⁰ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Buku-buku pokok seperti buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

c. Sumber Tersier

Sedangkan data tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, katalog, gambar, video, daftar pustaka buku, potongan majalah, koran dan juga catatan harian.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dipergustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan kata

²⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), h.107.

²¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.115.

lain tehnik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data dikumpulkan seperti di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandataan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.²²

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang dapat diamati.²³ Dengan pendekatan berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), h.107.

²³ Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.2.

BAB II

MUBADALAH DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

A. Latar Belakang Istilah Mubadalah

Salah satu tantangan serius ikhtiar mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan sosial adalah cara pandang dikotomis pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda sehingga keduanya dilihat bertentangan satu sama lain. Salah satu pihak mesti menaklukkan pihak lain. Jika tidak, maka ia yang ditaklukkan. Sistem patriarki mempunyai andil besar dalam cara pandang dikotomis ini. Cara pandang dikotomis seperti ini melahirkan stigmatisasi pada perempuan.²⁴

Stigma pada perempuan pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender, yaitu peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Perbedaan jenis kelamin menjadi alasan untuk melemahkan perempuan, dan sebaliknya mengukuhkan superioritas laki-laki. Cara pandang dikotomis seperti ini mempengaruhi sistem kehidupan yang melibatkan keduanya di berbagai level. Karenanya, dampak negatifnya merata dari kehidupan perkawinan dan keluarga, masyarakat dan negara, hingga global.²⁵

Feminisme sering kali dianggap hanya produk Barat, bukan berasal dari Indonesia, apalagi dalam Islam. Sudah terlalu sering kita mendengar kalimat seperti ini dilontarkan oleh pihak yang tidak menyukai gerakan perempuan progresif di Indonesia. Mereka menuduh gerakan ini berasal dari pemikiran-pemikiran barat, dari tokoh-tokoh feminis di luar Indonesia, padahal jauh sebelum

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.28.

²⁵ *Ibid.*, h.29 .

nama Indonesia itu ada, perempuan-perempuan nusantara sudah mempraktikkannya untuk menjadi diri sendiri.²⁶

Perempuan-perempuan nusantara yang tertulis dalam serat, babad, prasasti, dan teks kuno lainnya, merupakan tokoh-tokoh ksatria perempuan bahkan raja perempuan yang memiliki kesaktian tinggi seperti Raja Tribhuwana Tunggaladewi dari Kerajaan Majapahit, Ratu Kalinyamat dari Jepara, dan Nyi Ratu Mas Gandasari dari Aceh. Sayangnya, teks-teks yang membicarakan tentang raja, ratu, dan ksatria perempuan pada era-era tersebut masih tersembunyi.²⁷

Eksistensi dan peran ulama perempuan di Indonesia tidak banyak diketahui karena minimnya dokumentasi dan publikasi mengenai isu ini. Untuk pertama kalinya pada tanggal 25-27 April 2017, para ulama wanita berkumpul membahas masalah-masalah kontekstual terkait kaum hawa dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI yang I, di Pesantren Kebon Jambu al-Islami, Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini dihadiri sekitar 1.280 ulama dan cendekia perempuan dari seluruh penjuru tanah air.²⁸

Ekspedisi Feminis merupakan sebuah program perjalanan yang digagas oleh sekelompok perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap isu perempuan dan feminisme. Ekspedisi ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan kembali warisan leluhur Indonesia yang kaya akan nilai-nilai feminisme. Acara ini baru pertama kali diadakan dan Cirebon menjadi tujuan pertama karena memiliki sejumlah

²⁶“Xpedisi Feminis: Jati Diri Perempuan Nusantara dalam Islam Berkeadilan Gender”, (On-line), tersedia di : <https://magdalene.co/story/xpedisi-feminis-jati-diri-perempuan-nusantara-dalam-islam-berkeadilan-gender>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

²⁷*Ibid.*

²⁸“Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa”, (On-line), tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

pemimpin agama progresif dan paham isu gender. Di kota pelabuhan ini pula diadakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertama pada 2017.²⁹

Stereotip lainnya yang sering dilontarkan oleh kelompok anti-feminis adalah bahwa “feminisme tidak sejalan dengan Islam”, dan acara Ekspedisi Feminis tersebut ingin melawan argumen tersebut. Padahal dalam sejarah Islam, Jazirah Arab di masa sebelum kedatangan Islam memiliki budaya yang sangat menyudutkan perempuan, seperti poligami yang jumlahnya tidak terbatas, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, perempuan diperdagangkan dan diwariskan, serta berbagai macam budaya misoginis lainnya. Setelah Islam datang, budaya-budaya ini sedikit demi sedikit berubah. Pada masa tersebut Nabi Muhammad SAW sering kali membela hak-hak perempuan melalui hadits juga ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT.

Setiap rasul mempunyai misi yang sama, yaitu tauhid atau hanya menuhankan Allah Swt., yang berarti tidak menuhankan apa dan siapa pun selain-Nya. Pesan memanusiakan manusia dalam tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. mempunyai arti khusus, yaitu memanusiakan perempuan. Perlakuan tidak manusiawi pada perempuan yang dilakukan masyarakat Arab dan lainnya pada masa itu sangat luar biasa. Misalnya, perempuan berada di bawah kepemilikan mutlak laki-laki seumur hidup, dan diperlakukan sewenang-wenang secara masif. Perlakuan atas perempuan ini menunjukkan sistem patriarki yang sangat kuat. Islam mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan

²⁹“Xpedisi Feminis: Jati Diri Perempuan Nusantara dalam Islam Berkeadilan Gender”, (On-line), tersedia di : <https://magdalene.co/story/xpedisi-feminis-jati-diri-perempuan-nusantara-dalam-islam-berkeadilan-gender>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

perempuan menjadi sinergis. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki (QS. Al-Hujuraat [49]: 13), sehingga mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi. Perbedaan keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan, melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalani misi hidup. Karenanya, tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki.

Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits sesungguhnya merekam pergulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan. Karena itu kedua teks ini mengandung teks-teks yang merefleksikan ajaran ideal tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan, namun juga mengandung teks-teks yang merefleksikan tradisi patriarki masyarakat Arab yang sedang diubah menuju kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan dalam tauhid. Tafsir dan tradisi Islam hingga kini sejatinya adalah pergulatan terus-menerus antara nilai tauhid dan patriarki. Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal.

Berikut adalah kendala dalam praktik penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, di antaranya :

1. Teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muannats*) dengan aturan bahasa yang bias gender atas keduanya. Maha Suci Allah dari salah memilih bahasa namun, mengetahui cara gender dikonstruksi dalam bahasa

Arab menjadi penting agar pesan tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan tidak terkubur oleh karakter bahasa ini.

2. Dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun, pendekatan tekstual cenderung menuntun pembacanya untuk mengabaikan pemahaman kontekstual meskipun ketika pemahaman model kedua ini lebih merefleksikan kemanusiaan perempuan.
3. Sistem patriarki masih sangat kuat tidak hanya di Saudi Arabia pada masa turunnya, melainkan hingga kini. Begitu pula di wilayah-wilayah di mana Islam menyebar. Pemahaman tekstual yang lebih merefleksikan pandangan patriarki masyarakat Arab saat kehadiran Islam lebih mungkin diterapkan karena sesuai dengan sistem nilai setempat.

Islam sudah sempurna melalui al-Qur'an dan hadits. Tetapi, kerja-kerja penyempurnaan, atau mengembalikan kepada yang sempurna, masih belum selesai. Hal itu akan terus berkesinambungan tanpa henti, termasuk saat sekarang, karena manusia memiliki kehidupan yang dinamis dan bercampur dengan berbagai kepentingan, kebutuhan, dan keinginan. Sayangnya, seringkali yang lebih banyak diakomodasi adalah kebutuhan, kepentingan, dan keinginan laki-laki. Sehingga, Islam yang sempurna yang rahmatnya menyeluruh untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, lalu terekspos sedemikian rupa, seakan rahmat Islam itu hanya untuk laki-laki. Di sinilah pentingnya kerja-kerja dakwah penyempurnaan saat ini, atau dakwah mengembalikan kepada Islam yang

sempurna, yang rahmatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan, sebagaimana laki-laki.³⁰

Mubadalah merupakan salah satu realisasi kerja-kerja dakwah penyempurnaan saat ini, ia lahir sebagai teori kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, ia hadir memberikan cara penting untuk mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender. Konsep *Mubadalah* di susun dari pecahan-pecahan pemahaman yang berserakan dan tidak tersusun secara benar sepanjang sejarah peradaban Islam.

Pertama mendengar gagasan *mubadalah* atau kesalingan, banyak yang meloncat pada kesimpulan keliru. Menurut *mubadalah*, laki-laki boleh poligami, maka perempuan juga boleh poliandri? Begitu pun kira-kira respons awal orang-orang awam terhadap istilah *mubadalah*. Tentu saja kesimpulan tersebut keliru karena yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan dapat hidup secara adil berasaskan kemaslahatan kedua belah pihak.³¹ Terkadang, bisa langsung secara tekstual disalingkan. Seringnya, justru mesti melampaui teksnya agar tidak terjebak pada kesimpulan atas kemaslahatan salah satu pihak dengan cara memberikan beban pada pihak lain secara tidakimbang.³² Penggunaan kesalingan dapat dilakukan secara tekstual dan bisa juga melampaui teksnya. Pemakaian dari kedua cara tersebut merupakan bahasan dari *mubadalah*.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.39.

³¹ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam", *Jurnal Afkaruna*, Vol.15 No.1, (2019), h.33.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h 27.

Adapun ayat yang menjadi dasar *mubadalah* adalah Qs. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana”.

Ayat ini menegaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Di mana yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik rujukan, baik dari mazhab tekstual (*bi al-ma'tsūr*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*) mengartikan frasa *ba'dhum awliya'* *ba'din* dengan saling tolong menolong (*tanāṣur*), saling menyayangi (*tarāḥum*), saling mencintai (*taḥābub*) dan saling menopang (*ta'āḍud*) satu sama lain. Dengan makna-makna demikian, frasa (*ba'dhum awliya' ba'din*) ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.³³

Sama seperti artinya dalam bahasa Arab *mubadalah* berarti tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tanggung-rasa. Ia juga berarti timbal-balik (*reciprocity*) atau kesalingan. Kata ini digunakan untuk sebuah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama,

³³“Seputar Metode *Mubadalah*”, (On-line), tersedia di : <https://refrensi.mubadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-san-metode-mubadalah/>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2020).

kesederajatan dan kebersamaan, demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Tepatnya, untuk kebahagiaan keduanya di dunia dan akhirat. Keduanya.

Mubadalah adalah relasi kesalingan antar individu maupun kelompok, terutama antara laki-laki dan perempuan. Terinspirasi dari prinsip Islam yang *rahmatan lil'alamin*, *Mubadalah* hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan, pada tataran praktek kehidupan sehari-hari, dalam keluarga maupun bermasyarakat. Istilah *mubadalah* diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai ensiklopedia tematik. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir adalah feminis, aktivis dan ulama yang selalu gelisah terhadap fakta ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terus-menerus berlangsung. Naifnya, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan selalu dikokohkan oleh tafsir agama. Berawal dari kegelisahan tersebut, beliau mencari berbagai metode dan pendekatan untuk menyelami makna kitab yang agung itu.³⁴

Konsep dan metode pemaknaan *mubadalah* merupakan bagian kecil dari kerja-kerja peradaban Islam Indonesia yang meyakini keadilan relasi perempuan dan laki-laki. Konsep ini terlahir dari persinggungan Faqihuddin yang intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Ia lahir dari dan hidup bersama gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan perspektif Islam di Indonesia, bersama para ulama dan aktivis, yang sebagian besar hadir pada perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Rajab 1438/April 2017. Kemitraan,

³⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.45.

kesalingan, dan kerja sama tampak jelas sebagai norma utama yang dipraktikkan selama perhelatan KUPI.

Mubadalah bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa, tetapi justru sebagai jawaban dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Konsep *mubadalah* disusun dari kepingan-kepingan *puzzle* yang berserakan sepanjang sejarah tradisi peradaban Islam yang diyakini oleh Faqihuddin gambar utuhnya ada di keseluruhan al-Qur'an dan hadits. Tepatnya, ia ada dalam jantung ajaran Islam. *Mubadalah* merupakan salah satu upaya pengumpulan kembali dan penyatuan kepingan-kepingan *puzzle* tersebut yang sebagian besar, dalam konteks Indonesia, sudah diawali oleh para ulama, pemikir, akademisi, dan aktivis, terutama sejak dekade awal 90-an.³⁵ Metode ini dalam prakteknya berupaya menggali makna teks (al-Qur'an dan hadits) agar dapat diterapkan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus, karena jika ditemui sebuah teks yang hanya menyapa salah satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian lebih komprehensif agar didapatkan makna yang dapat berlaku untuk keduanya (laki-laki dan perempuan).³⁶

Metode yang ditawarkan *mubadalah* merupakan sumbangan penting di bidang penafsiran, tidak hanya dalam memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia. Meskipun metode ini dimaksudkan untuk merespons teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, namun metode yang sama juga bisa menjadi cara baru

³⁵ *Ibid.*, h.56.

³⁶ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam", *Jurnal Afkaruna*, Vol.15 No.1, (2019), h.132.

dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, apa pun, bisa melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak yang mempunyai relasi.³⁷

B. Penerapan Metode *Mubadalah* dalam Penafsiran

Mubadalah bisa dikembangkan sebagai kaidah penafsiran dalam memaknai teks, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender. Sehingga, teks yang secara bahasa untuk laki-laki bisa menyasar perempuan, begitupun teks untuk perempuan juga mencakup laki-laki. Selama pesan dari teks tersebut bersifat umum dan mencakup kedua jenis kelamin. Sementara ini, dikotomi antara teks untuk laki-laki dan teks untuk perempuan telah melahirkan berbagai tafsiran Islam mengenai gender yang bersifat absolut, seksis, timpang, dan melestarikan berbagai kekerasan terhadap perempuan. Dikotomi ini juga yang melahirkan kebudayaan dominatif, dari satu jenis kelamin kepada yang lain, hegemonik, dan pada akhirnya juga destruktif.³⁸

Pada dasarnya, metode pemaknaan *mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya.
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.28.

³⁸“Seputar Metode *Mubadalah*”, (On-line), tersedia di: <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2020).

3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.³⁹

Berpijak pada tiga dasar premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontestual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, salah satu tujuan dari metode *mubadalah* adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil'alam*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang.

Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal. Di sinilah *Mubadalah* menemukan signifikansinya. Teks dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

1. *Mabadi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan apa pun. Misalnya, teks tentang tauhid, kemaslahatan, *maqashid al-syari'ah*, kemanusiaan, penghormatan, kesetaraan, kebaikan, kebenaran, dan lain-lain. Berisi ajaran fundamental dalam Islam, misalnya adalah keimanan untuk semua orang, keutamaan

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.196.

pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapa pun yang beriman dan beramal baik, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.

2. *Qawa'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu kehidupan. Misalnya, dalam perdagangan (ekonomi), ada teks tentang keharusan nilai saling rela, kejujuran, saling menguntungkan. Dalam perkawinan, ada teks tentang *sakinah, mawaddah, rahmah*, janji kokoh (*mitsaqan ghalizan*), memperlakukan istri atau suami secara bermartabat (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dan juga ajaran prinsip yang tematikal lainnya seperti politik.
3. *Juz'i*, yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami atau istri, dan lain sebagainya. Teks *Juz'i* harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam di atasnya, baik *Mabadi'* maupun *Qawa'id*.

Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara hierarkis, yaitu teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Artinya, teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawa'id*, apalagi *mabadi'*. Dengan cara kerja seperti ini, maka teks-teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat

Arab yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawa'id* dan *mabadi'* yang menjiwai dan memayunginya.⁴⁰

Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan sebelum memulai kerja interpretasi *mubadalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz'iiyyat*, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki dan perempuan. Dan kerja utamanya, lalu, adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawa'id* dan terutama teks-teks *al-mabadi'*.⁴¹ Metode kerja interpretasi *mubadalah*, pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks-teks *al-juz'iiyyat* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip, baik yang bersifat fundamental (*al-mabadi'*) maupun yang tematika (*al-qawa'id*). Kerja metode *mubadalah*, karena itu, meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang tertuang dalam teks-teksnya. Keutuhan dan penyatuan ini berporos pada pondasi yang prinsip tersebut.⁴²

Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah *pertama*, seperti penjelasan di atas, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Ayat-ayat prinsip ini, baik yang *al-mabadi'* maupun yang *al-qawa'id*, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain C yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.35.

⁴¹ *Ibid.*, h.199.

⁴² *Ibid.*

dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial (*al-juz' iyyat*).

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesi dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah-langkah pertama. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubadalahkan* antara dua jenis kelamin. Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan bersifat *mubadalah*, timbal balik, atau kesalingan.

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan juga sebaliknya, selama kita menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus

dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.

Kerja metode *mubadalah* adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang terbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakar*) di mana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*muannats*) dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan metode *mubadalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan di dalamnya.⁴³

Untuk memudahkan penjelasan, penulis akan memberikan contoh penafsiran *mubadalah*, namun sebelumnya penulis akan memberikan ayat yang menjadi dasar bahwa teks-teks suci diwahyukan Allah Swt. untuk laki-laki dan perempuan, pada ayat yang pertama kali diwahyukan, yaitu Al-alaq 1-5 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad Saw. yang seorang laki-laki. Secara literal, ayat berbicara menggunakan struktur bahasa laki-laki yang dipakai masyarakat Arab, bukan struktur kalimat perempuan. Yaitu, kalimat *iqra’i*. Tetapi, Nabi Muhammad Saw. paham bahwa wahyu ini bukan hanya untuk

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 196.

dirinya, tetapi juga untuk umat manusia. Karena itu, orang yang pertama kali diperdengarkan oleh beliau tentang wahyu ini adalah perempuan. Yaitu, Khadijah binti Khuwailid Ra. istri baginda Nabi Muhammad Saw. Artinya ayat ini ditujukan tidak hanya untuk laki-laki, tetapi untuk perempuan juga. Bisa disimpulkan juga dari sini bahwa semua ajakan dan perintah dalam al-Qur'an adalah tertuju pada laki-laki dan perempuan. Tanpa membedakan sama sekali. Islam mengajak keduanya, memanggil keduanya, dan meminta komitmen dari keduanya.

Berikut adalah contoh penggunaan metode *mubadalah* dalam pemaknaan ayat, yaitu pada ayat Qs. Ali 'Imran ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Menurut tafsir Kemenag dari ayat ini bahwa perempuan, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah menyenangkan manusia dan sangat dicintainya. Sesungguhnya Allah menjadikan tabiat manusia cinta kepada harta benda dan kesenangan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan harta benda dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan seseorang, apakah dia akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan duniawi saja, ataukah dia akan menggunakan harta bendanya untuk mencapai keridaan Allah. Benda-benda kesenangan manusia dalam ayat ini salaj

satunya menyebukan perempuan. Perempuan (istri), istri adalah tumpuan cinta dan kasih sayang. Sebagian besar hasil usaha kaum lelaki yang diperoleh dengan susah payah diperuntukkan bagi anak dan istri. Para lelaki adalah pembimbing yang bertanggung jawab atas kaum perempuan, karena lelaki itu memiliki kekuatan dan kemampuan melindungi mereka. Tetapi mencintai perempuan secara berlebihan mempunyai efek yang kurang baik terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan dapat pula mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini, mencintai istri disebutkan lebih dahulu daripada mencintai anak-anak, walaupun cinta kepada istri itu dapat luntur, sedang cinta pada anak tidak; karena cinta pada anak jarang sekali berlebih-lebihan seperti halnya mencintai perempuan.⁴⁴

Pernyataan rasional bahwa “manusia itu tercipta untuk mencintai perhiasan dunia berupa perempuan”. Ayat ini secara literal menempatkan “manusia”, yang pasti akan diartikan laki-laki, tercipta secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Dalam ungkapan lain, biasanya, perempuan dianggap sebagai “perhiasan dunia” yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki.

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan perempuan merupakan objek dan hanya ditujukan oleh laki-laki. Padahal, semua ayat yang diturunkan Allah Swt ditujukan untuk perempuan dan laki-laki seperti yang sudah dijelaskan dari makna surat Al-alaq ayat 1-5. Menurut perspektif *mubadalah*, perempuan secara *mubadalah* bisa pula menjadi subjek yang diajaki bicara oleh ayat tersebut dan

⁴⁴“Tafsir Q.S 3:14”, (On-line), tersedia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2020)

menjadi orang yang dimintai waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia.

Perspektif *mubadalah* sampai pada makna tersebut melalui langkah-langkah metode pemaknaan berikut:

1. Kita merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk. Ini adalah prinsip Islam. Tanpa membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu ayat yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan adalah Qs. at-Taubah ayat 71, yang meminta keduanya untuk saling berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk (*amar ma'ruf, nahi munkar*). Ayat ini menjadi pondasi dalam pemaknaan Qs. Ali 'Imran ayat 14 tersebut, yakni laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dari perintah, larangan, dan peringatan Allah Swt.
2. Sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertaman, maka gagasan utama yang bisa digali dari Qs. Ali 'Imran ayat 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah Swt. Ayat ini tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas dan perak adalah perhiasan dunia. Ini benar. Tetapi, ini hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja berlaku untuk semua orang, tidak khusus laki-laki semata. Sederhananya, jika

subjek dan objek dalam ayat ini dihilangkan, maka ayat ini tentang kewaspadaan seseorang dan ketergodaan terhadap pesona orang lain. Karena pesan dan makna ada pada predikat kalimat, sedangkan subjek-objek biasanya bersifat kontekstual dan teknis.

3. Berdasarkan pada kedua langkah tersebut, secara literal (*lafzhiyyah*) gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara resiprokal (*mubadalah*) gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik laki-laki dan perempuan adalah sumber pesona dan tidak melulu tentang pesona tubuh perempuan di mata laki-laki.

Jadi, dengan langkah pertama, kita menemukan prinsip nilai yang menjadi pondasi interpretasi yaitu bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek perintah keimanan dan larangan tergelincir pada godaan. Dengan langkah kedua, kita menemukan gagasan utama dari teks (Qs. Ali ‘imran [3]: 14) bahwa ia membicarakan pentingnya kewaspadaan pada perhiasan dunia yang bisa menggiurkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan langkah ketiga, kita menegaskan bahwa pernyataan “perempuan sebagai perhiasan dunia bagi laki-laki” hanyalah contoh literal dari teks yang ditujukan kepada laki-laki. Ini makna eksplicit-literal. Dengan metode *mubadalah*, karena teks itu juga harus ditujukan kepada perempuan, maka maknanya menjadi: “laki-laki adalah (salah

satu) perhiasan dunia bagi perempuan”. Bagian ini adalah makna implisit-resiprokal.⁴⁵

Contoh lain adalah mengenai teks-teks yang menyasar secara langsung kepada perempuan. Atau, perempuan sebagai subjek dalam teks-teks relasi pasangan suami-istri. Misalnya, hadits yang menyatakan bahwa: “*perempuan atau istri yang tidak pandai berterima kasih pada kebaikan suami akan menghuni neraka*” (HR. Bukhari, no.305), “*perempuan yang tidak melayani kebutuhan biologis suami akan dilaknat malaikat*” (HR. Bukhari, no.5248), “*perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar akan diharamkan dari surga*” (HR. Abu Dawud, no.2228).

Pada langkah pertama dari metode pemaknaan *mubadalah* pada hadits-hadits di atas, kita harus merujuk kembali kepada ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyatakan prinsip-prinsip Islam (*mabadi'*); bahwa laki-laki dan perempuan itu diminta oleh Islam untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang lain, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Begitu pun prinsip-prinsip relasi pasutri (*qawa'id*) yang lima pilar itu. Yaitu, bahwa suami dan istri itu adalah bermitra dan berpasangan; keduanya harus menjaga ikatan pernikahan secara kokoh, saling berbuat baik satu sama lain, saling berembuk, serta saling mengupayakan kerelaan dan kenyamanan pasangan.

Prinsip ini menjadi pondasi pemaknaan pada proses langkah kedua dan ketiga. Pada langkah kedua, jika kita menggunakan cara yang sederhana, dengan menghilangkan subjek dan objek, maka gagasan utama dari hadits pertama adalah

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.206.

mengenai orang yang tidak berterima kasih pada pasangan. Hadits kedua mengenai orang yang tidak melayani kebutuhan seks pasangan. Dan yang ketiga mengenai orang yang mudah meminta/menjatuhkan talak. Pada langkah ketiga, gagasan-gagasan ini diberlakukan pada laki-laki, yang tidak berterima kasih pada istrinya (hadits pertama), yang tidak mau melayani kebutuhan istrinya (hadits kedua), dan yang mudah menjatuhkan talak tanpa alasan yang mendasar (hadits ketiga).

Jadi, perspektif dari metode *mubadalah* menegaskan bahwa hubungan antara suami istri harus dipelihara oleh keduanya. Karena itu, gagasan utama dari teks-teks tersebut adalah justru tentang: berterima kasih pada kebaikan, pentingnya melayani kebutuhan biologis pasangan, buruknya perceraian tanpa alasan mendasar. Gagasan-gagasan ini ditemukan dalam langkah kedua, setelah kita meyakini adanya prinsip relasi yang setara, adil, dan kerja sama antara suami dan istri dalam langkah pertama.⁴⁶

Kesimpulannya adalah metode *mubadalah* ini jika dihadapkan pada sebuah teks, baik Qur'an maupun Hadits, maka jangan terpaku pada subyek obyeknya yang biasanya mengandung unsur laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab sangat kental dengan struktur kata dan kalimat khas laki-laki atau perempuan. Tetapi fokus pada pesan yang ingin disampaikan teks tersebut. Kaitkan pesan ini dengan prinsip-prinsip kesalingan yang bertebaran di berbagai ayat dan hadits yang lain. Lalu berlakukan pesan tersebut secara berkesalingan. Jika secara literal dari laki-laki kepada perempuan, maka secara berkesalingan bisa dari perempuan kepada

⁴⁶ *Ibid.*, h.208

laki-laki. Sehingga pesan dari teks tersebut bisa diaplikasikan oleh dan untuk keduanya.⁴⁷

Pada praktiknya, ada beberapa teks yang perlu kehati-hatian dalam mengoperasikan metode *mubadalah*. Misalnya Qs. an-Nisaa' [4]: 3, yang membolehkan laki-laki, pada kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu, untuk menikahi lebih dari satu perempuan, atau poligini. Makna "kebolehan poligini" adalah bukan gagasan utama ayat, karena itu tidak berlaku *mubadalah*. Artinya, perempuan tidak diperbolehkan poliandri, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan pernikahan yang menjadi pondasi *mubadalah*. Jika pemaknaan *mubadalah* hendak diterapkan pada ayat poligami tersebut, maka perlu dicari makna-makna lain dari ayat tersebut. Makna yang bisa ditarik untuk di-*mubadalah*-kan adalah mengenai pentingnya kewaspadaan dari pernikahan berisiko pada ketidakadilan dan kezhaliman. Misalnya, melakukan poligami.

Jika melihat konteks internal teks yang lain (*siyaq al-kalam*), poligami bisa dianggap sebagai media untuk memastikan anak-anak yatim memperoleh keadilan dan perlindungan sosial (*wa in khitfum alla tuqsithu fi al-yatama*). Sehingga, yang di-*mubadalah*-kan adalah kerja perlindungan anak-anak yatim, yang bisa dilakukan oleh laki-laki, salah satunya dengan cara menikahi ibu dari anak-anak tersebut (merupakan makna literal teks), atau bisa oleh perempuan dengan mengadopsi anak-anak tersebut (ini makna *mubadalah*).

⁴⁷ *Ibid.*

C. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Ruang Domestik maupun Publik

Perspektif *Mubadalah*

Semua ajakan dan perintah dalam al-Qur'an adalah tertuju pada laki-laki dan perempuan. Ada banyak ayat al-Qur'an yang mengajak untuk beriman, bertakwa, beramal baik, shalat, puasa, haji, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, bersabar, melayani pasangan dan melakukan aktivitas sosial untuk kepentingan masyarakat, semuanya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Tanpa membedakan sama sekali. Islam mengajak keduanya, memanggil keduanya, dengan prinsip 'siapa yang berbuat, ia yang dapat, bukan atas dasar jenis kelamin sama sekali.⁴⁸

Ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan Allah Swt. dan teks-teks hadits yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw., dengan tegas dan terang benderang telah menegaskan Islam datang kepada perempuan, sebagaimana datang kepada laki-laki. Islam meminta masing-masing laki-laki dan perempuan menjadi pribadi yang baik (*shalih* dan *shalihah*), mengajak mereka bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), dan mendorong mereka bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik (*khairu ummah*) dan mendirikan negara yang sentosa (*baladah thayyibah*), yang didasarkan pada kemitraan dan kesalingan (*awliya' ba'dhuhum 'ala ba'dhin*), serta komitmen menghadirkan kebajikan (*amar ma'ruf*) dan menolak keburukan (*nahi munkar*). Semua ajaran keimanan dan amal shalih dalam Islam adalah datang untuk laki-laki dan perempuan. Bukan juga untuk memuliakan yang satu, dan menistakan

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.309.

yang lain. Bukan. Prinsipnya, siapa yang beriman, dialah yang dapat kemuliaan. Siapa yang beramal shalih, dialah yang akan dapat ganjaran pahala dan balasan surga.⁴⁹

1. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Ruang Domestik Menurut

Mubadalah

Peran domestik dalam istilah gender berkaitan dengan wilayah – wilayah domestik rumah tangga. Sebagian orang mengibaratkan wilayah domestik dengan wilayah dapur sumur dan kasur. Yaitu berkaitan dengan urusan memasak, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan pengasuhan anak. Sepintas wilayah kerja tersebut tampak sederhana.

Padahal jika tidak di *manage* dengan baik, tugas – tugas yang terbengkalai dalam wilayah itu acapkali menjadi sumber konflik⁵⁰

Medan pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam adalah di dalam keluarga dan rumah tangga. Rumah adalah sekolah pertama bagi seorang anak, yang akan melihat bagaimana ayahnya memiliki relasi, sikap dan perilaku terhadap ibunya. Begitu relasi sang ibu dengan ayah. Begitulah daur pembelajaran terus berputar dan turun menurun melalui keluarga. Jika yang diterima dan diserap anak adalah baik, maka kebaikanlah yang akan disemaikan di kehidupannya nanti saat dewasa. Untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan penduduk global dunia. Begitu pun sebaliknya.

⁴⁹ *Ibid.*, h.310.

⁵⁰“Peran Domestik dan Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Islam”, (On-line), tersedia di : <http://myzahraadres.blogspot.com/2017/01/peran-domestik-dan-peran-publik.html>, (diakses pada tanggal 3 Juni 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka langkah pertama dari kehidupan keluarga yang harus dipastikan adalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya adalah standar moral tertinggi dalam Islam. Kutipan di atas menegaskan hal ini, dengan mendahulukan laki-laki sebagai orang yang secara sosial memiliki pengaruh dan sekaligus tanggung jawab. Hal itu agar pengaruh dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki benar-benar digunakan untuk kebaikan keluarga. Sebab, tidak menutup kemungkinan, ada laki-laki, atau bahkan banyak, yang menggunakan kewenangan ini justru untuk menegasikan kemanusiaan perempuan, menguasai perempuan, dan memutus mereka dari segala manfaat dan maslahat kehidupan, baik yang ada di ranah domestik keluarga, maupun ranah publik. Karena itu perintah berbuat baik kepada keluarga ditegaskan kepada para laki-laki, sebagai suami atas istri, atau ayah atas anak-anaknya.

Perspektif keadilan hakiki dan *mubadalah* telah memberikan perhatiannya terhadap siklus reproduksi ini yang menjadi bagian dari kesadaran kemanusiaan yang tidak bisa dijadikan alasan oleh siapa pun untuk mengurangi hak-hak perempuan. Atas dasar inilah, mengapa laki-laki disasar terlebih dahulu oleh teks-teks hadits untuk selalu waspada pada tindak kezhaliman yang dilakukan terhadap perempuan, diingatkan secara terus-menerus untuk selalu menjadi orang yang berperilaku baik terhadap perempuan, istri, dan anak-anak. Sejatinya, berperilaku baik adalah universal dan berlaku *mubadalah*, laki-laki terhadap perempuan

dan perempuan terhadap laki-laki. Begitu pun orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Lalu, antartetangga dan sesama anggota komunitas, bangsa, dan dunia.

Jika kebaikan hidup di dunia dan di akhirat yang harus dicapai bersama oleh pasangan suami-istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar yang menyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata mereka. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, lalu disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini, jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, adalah lima hal. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqan ghalizhan*, QS. An-Nisaa' [4]: 21) , prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. al-Baqarah [2]:187 dan QS. ar-Ruum [30]: 21), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. al-Baqarah [2]: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisaa' [4]: 19), dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

Ayat-ayat mengenai lima pilar ini adalah teks-teks basis dalam perspektif *mubadalah*. Ayat-ayat ini, sekalipun menggunakan struktur laki-laki (*mudzakkar*), tetapi ia termasuk yang eksplisit menyebutkan pasangan suami-istri dan ayah-ibu. Karena itu, semua ayat lima pilar ini

secara substansi mengarah pada kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Di antara lima pilar ini, yang paling kentara sebagai etika puncak dari pernikahan adalah yang ketiga, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*. Pilar ketiga ini menjadi ruh utama bagi pilar-pilar yang lain dan semua ajaran serta aturan terkait dengan relasi suami dan istri.

Dalam perspektif *mubadalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan mereka berdua, atau salah satunya, adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkan atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkan atau oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama pernikahan, adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan yang berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta suami” sama halnya dalam perspektif *mubadalah*, dalam pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami.”⁵¹

Dalam perspektif *mubadalah* pada ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.371.

Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat kewajiban memberi nafkah untuk laki-laki, tetapi sebagaimana dengan ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Sehingga, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitupun hadits-hadits yang mengapresiasi laki-laki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab, prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.⁵²

Berikut adalah teks yang menjadi dasar untuk laki-laki dan perempuan agar berbuat baik dan saling tolong menolong:

1. QS. al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. QS. al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

⁵² Ibid., h. 372.

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

3. QS. al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

4. QS. ath-Thalaaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

5. QS. al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ الْوَالِدَةُ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat pertama tersebut, QS. al-Jumu'ah [62]: 10, berbicara mengenai shalat dan anjuran mencari rezeki setelahnya. Setelah memperoleh rezeki, lalu dianjurkan untuk berbagi, memberi, dan berinfak (QS. al-Baqarah [2]: 3 dan 267). Anjuran berbagi dan berinfak ini, tentu saja, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang kaya yang tentu harus memberi lebih banyak daripada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (QS. ath-Thalaaq [65]: 7). Semua ayat ini, tentu saja, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sementara, ayat terakhir, secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusunya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Tetapi, dengan prinsip *mubadalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta

adalah perempuan/istri, ibu, pada saat sekarang, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga, pada prinsipnya, dalam perspektif *mubadalah*, adalah tanggungjawab bersama. Suami-istri, atau ayah-ibu, masing-masing bisa berperan secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Lebih luas dari itu, dalam konteks menguatkan hubungan suami-istri, aktivitas seks hanyalah salah satu dari ekspresi untuk menguatkan relasi marital dan mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan. Sebab, kehidupan perkawinan tidak melulu berisi aktivitas seks. Ada banyak hal yang dapat memperkuat ikatan kasih sayang di dalam relasi pasutri. Sehingga, yang lebih prinsip, dalam perspektif *mubadalah*, adalah bagaimana relasi pasutri itu terus diperkuat satu sama lain, antara suami-istri, dengan berbagai bahasa dan ekspresi kasih sayang, sehingga ikatan pernikahan semakin kokoh, menyenangkan dan membahagiakan.⁵³ Nafkah dan seks, sekalipun yang utama, hanyalah salah satu bagian dari ekspresi kasih sayang untuk penguatan relasi marital pasangan suami-istri.

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.388.

2. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan di Ruang Publik Menurut

Mubadalah

Di ruang publik, perspektif *mubadalah* meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi di ruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga terutama anak-anak. Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perbedaan di antara individu-individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Berikut adalah salah satu ayat yang menjadi dasar perempuan juga dibutuhkan di bidang publik.

QS. at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat ini, sesungguhnya sudah terang benderang bahwa laki-laki dan perempuan didorong untuk berkiprah dalam kerja-kerja yang dapat menghadirkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan menghindarkan keburukan (*nahi munkar*) dalam kehidupan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta mendirikan segala nilai dan ajaran-ajaran Allah Swt. dan Rasul-Nya. Shalat bisa menjadi representasi dari aktivitas ritual agama, zakat adalah kegiatan sosial ekonomi, sementara *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* bisa merepresentasikan kerja-kerja politik pada masa sekarang. Semua aktivitas ini, tentu saja, ada yang di ranah domestik rumah tangga, tetapi lebih banyak lagi berada di ranah publik secara luas. Dengan mempertimbangkan ketegasan al-Qur'an menyebut perempuan secara eksplisit dalam ayat tersebut sebagai subjek, maka tidak ada alasan sama sekali, atas nama Islam, untuk meminggirkan dan menomorduakan mereka. Baik sebagai subjek yang terlibat berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja tersebut maupun sebagai subjek yang merasakan hasilnya.

Jika kesuksesan perempuan di ruang publik harus selalu dikaitkan dengan kesuksesannya di ruang domestik, maka sesungguhnya laki-laki juga sama. Anjuran bahwa perempuan yang bekerja di ruang publik tidak boleh melupakan perannya sebagai istri dan ibu adalah sama juga bagi laki-laki yang bekerja agar tidak melupakan perannya sebagai suami dan ayah. Dalam perspektif *mubadalah*, kedua ruang ini adalah arena bersama yang menjadi tanggung jawab bersama, yang sekaligus

manfaatnya juga harus dirasakan bersama. Laki-laki dan perempuan. Tentu saja, *mubadalah* harus memperhatikan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tetapi secara prinsip, tidak boleh salah satu jenis kelamin dibebani sesuatu dari salah satu ruang tersebut sendirian, atau memperoleh manfaatnya sendirian.

Teks yang sering dihadirkan untuk menghambat aktivitas publik perempuan adalah hadits tentang perempuan adalah aurat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ
فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشَرَّ فِيهَا الشَّيْطَانُ

Abdulla bin Mas'ud Ra. yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Perempuan itu aurat. Jika keluar (rumah), ia akan disambut oleh setan.” (*Sunan al-Tirmidzi*, no. 1206).

Teks ini sering dipahami sebagai pelarangan atau pengekangan perempuan dari ranah publik. Sebab, dalam pemahaman ini, jika mereka keluar rumah maka akan disambut oleh setan untuk bersama-sama menggoda masyarakat, atau tepatnya menebar pesona kepada para laki-laki.

Adapun teks lainnya yang memiliki makna tentang perempuan adalah aurat ditemukan pada QS. an-Nuur ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ
ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Merujuk pada ayat ini, teks hadits mengenai “perempuan adalah aurat” sesungguhnya tidak identik dengan konsep “fitnah” yang dimiliki secara natural oleh perempuan dalam persepsi laki-laki, di mana jika subjeknya adalah perempuan, maka yang memiliki “aurat” dan “fitnah” adalah justru laki-laki. Jika laki-laki yang juga memiliki “fitnah” dan “aurat” tidak dilarang berkiprah di ranah publik, sekalipun kemungkinan destruksi “fitnah” dan “aurat” laki-laki juga besar, maka melarang perempuan dengan alasan tersebut adalah tindakan yang diskriminatif dan tidak adil.

Maka teks hadits tersebut, dalam perspektif *mubadalah* adalah bukan mengenai pengekangan atau pelarangan, tetapi hanya sebatas kewaspadaan terhadap potensi negatif dari dua pihak, diri perempuan dan diri laki-laki. Teks itu menyapa keduanya, laki-laki dan perempuan, sebagai subjek yang mungkin menjadi pelaku dan pada saat yang sama mungkin menjadi korban. Keduanya diminta waspada dan menjaga diri agar tidak menjadi pelaku maupun korban dari kemungkinan potensi

“menggoda” dan “tergoda” tersebut.⁵⁴ Begitu pun hadits kepemimpinan juga tidak bisa dipahami secara eksklusif untuk kepemimpinan laki-laki. Sebab, jika dibaca secara saksama, hadits tersebut sesungguhnya tidak membicarakan kepemimpinan, tetapi lebih kepada pentingnya tanggung jawab.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَتِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibnu Umar Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap kamu memiliki tanggung jawab, dan setiap kamu akan ditanya mengenai pertanggungjawaban yang dimilikinya tersebut. Seorang imam (kepala negara) yang memimpin rakyat adalah bertanggung jawab mengenai (kemaslahatan mereka) dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya tersebut, seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab mengenai keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban, seorang perempuan (istri) adalah bertanggung jawab terhadap keluarga suaminya dan anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban, hamba sahaya juga bertanggung jawab pada harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah, setiap kamu pasti memiliki tanggung jawab dan akan dituntut pertanggungjawaban atas hal tersebut.” (Shahih Bukhari, no. 7225)

Dengan basis perspektif *mubadalah*, “*ra'in*” tidak diartikan “pemimpin”, tetapi “mengelola dan bertanggung jawab”. Sebab, ada ungkapan bahwa hamba sahaya “*ra'in*” terhadap harta majikannya. Ini tidak bisa diartikan “pemimpin”, tetapi lebih tepat bertanggung jawab mengelola secara baik, benar, dan mendatangkan manfaat. Begitu pun

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.461.

untuk yang lain, kata “*ra'in*” berarti “mengelola secara bertanggung jawab”. Pengelolaan sesuatu dan pertanggungjawaban atasnya, dalam Islam, tidak didasarkan pada jenis kelamin. Sehingga, yang dalam teks tersebut hanya contoh saja, suami bertanggung jawab pada keluarganya, serta istri pada keluarga suami dan anak-anaknya. Sebab, suami juga diminta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sendiri. Begitu pun kata “*imam*” tidak bisa diartikan pemimpin laki-laki, karena bukan itulah inti pembahasan hadits. Tetapi, intinya ialah soal tanggung jawab yang harus diemban seorang pemimpin mengenai rakyatnya, baik pemimpin itu laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, hal yang penting itu ialah bagaimana kepemimpinan bisa mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, bukan apa jenis kelamin pemimpinnya.⁵⁵

Perspektif *mubadalah* pada intinya menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang setara di hadapan teks-teks otoritatif, termasuk teks dan kaidah yang membicarakan rumusan mengenai kemaslahatan publik.⁵⁶ Lebih dari itu, kepemimpinan yang *mubadalah* adalah model kepemimpinan yang secara substansi mendasarkan pada kerja sama, kebersamaan, kepercayaan, dan apresiasi, bukan pada autoritarisme, kekuasaan, hegemoni, dan ketakutan. Kepemimpinan yang memberikan ruang yang nyaman bagi laki-laki dan perempuan untuk berekspresi dan berpartisipasi secara maksimal demi menghadirkan

⁵⁵ *Ibid.*, h.509.

⁵⁶ *Ibid.*, h.511.

kebaikan-kebaikan bagi masyarakat dan menghadirkan kebaikan-kebaikan dari mereka.⁵⁷

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada literatur yang ada, ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Asih Darojatun, 2017, yang berjudul “*Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) (Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung)*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa komitmen dan kerja nyata Fatayat NU Provinsi Lampung terkait upaya membangun kesadaran kritis kaum perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan, sudah cukup dibuktikan. Dalam AD/ART Fatayat NU memiliki tujuan untuk membuka kesempatan serta peluang untuk memaksimalkan potensinya di berbagai bidang sehingga para perempuan mampu meningkatkan kualitas diri mereka sebagai individu bahkan sebagai warga negara. Menurut Fatayat NU, perempuan harus menjadi subjek atau pelaku. Seiring dengan terbukanya berbagai kesempatan dan jalan untuk memperjuangkan nasib dan hak perempuan.⁵⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Asih Darojatun sama-sama membahas kepemimpinan politik perempuan. Perbedaanya adalah ia mengkaji kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Fatayat NU di

⁵⁷ *Ibid.*, h.510.

⁵⁸ Asih Darojatun, “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) (Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung)”. (Skripsi Program Sarjana Sosial UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h.87.

Lampung, sedangkan penelitian ini mengkaji kepemimpinan politik perempuan di Indonesia menurut perspektif *mubadalah*.

2. Skripsi karya Eka Ratna Sari, 2017, yang berjudul “*Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Musdah Mulia ketika ikut serta dalam kegiatan perpolitikan, ketika perempuan menjadi seorang pejabat maka tugas agendanya lebih menyentuh secara langsung ke lapisan masyarakat, karena seorang perempuan dengan sifat feminimnya yang mengasihi, menyayangi, dan sikap mensejahterakan orang lain akan diaplikasikan kepada masyarakatnya. Menurut penulis perempuan mempunyai hak untuk ikut serta dalam membangun negaranya, yang dalam hal ini menjadi seorang pejabat maka, perempuan tersebut benar-benar mendedikasikan kemampuannya untuk mensejahterakan masyarakat, seperti perumpamaan seorang ibu yang mengasuh anaknya.⁵⁹

Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Eka Ratna Sari adalah sama-sama membahas mengenai kepemimpinan perempuan di ranah politik, perbedaannya adalah ia mengkaji kepemimpinan perempuan berdasarkan penelitian lapangan yaitu berdasarkan dari pengalaman seorang tokoh yaitu Siti Musdah Mulia, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap analisis Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi salah satu dasar kepemimpinan politik perempuan di Indonesia.

⁵⁹Sari, Eka Ratna. *Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik menurut Siti Musdah Mulia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), h..3

3. Jurnal karya Halimah B., 2018, yang berjudul "*Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir*". Dalam jurnal ini disimpulkan Para Mufassir kontemporer sepakat bahwa QS. An-Nisa ayat 34 berbicara dalam konteks urusan keluarga tidak ada hubungannya dengan soal hak politik perempuan. Demikian juga dalam kepemimpinan masyarakat tidak ada kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah terhadap masyarakat yang dipimpinnya, tetapi hanya berkaitan dengan kewajiban melaksanakan tanggungjawabnya dan menegakkan keadilan terhadap masyarakat yang dipimpinnya.⁶⁰

Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal Halimah B, adalah sama-sama membahas mengenai kepemimpinan politik perempuan, perbedaanya adalah jurnal ini menganalisis kepemimpinan politik perempuan berdasarkan ayat suci al-Qur'an dan Hadits, sedangkan penelitian ini mengkaji kepemimpinan politik perempuan berdasarkan perspektif *mubadalah*.

4. Jurnal karya Widya Agesna, 2018, yang berjudul "*Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa dalam Islam sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Ada yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, sebaliknya ada juga yang tidak membolehkan. Sekalipun kelak dibahas di MUI, maka hasil akhirnya

⁶⁰B.,Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir." *Al-Daulah* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin) Vol.7 No.1 (2018). h.65.

bisa dipastikan terjadi perbedaan. Akan tetapi menurut jurnal ini, mayoritas ulama lebih banyak yang tidak membolehkan.⁶¹

Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal karya Widya Agesna, adalah sama-sama membahas mengenai kedudukan perempuan dalam jabatan kepemimpinan politik. Perbedaannya adalah jurnal ini menganalisis kedudukan pemimpin politik perempuan berdasarkan pandangan ulama-ulama dan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji kepemimpinan politik perempuan berdasarkan perspektif *mubadalah*.

5. Jurnal karya Samsul Zakaria, 2013, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia sama-sama memberikan apresiasi (positif) terhadap kepemimpinan perempuan. Menurut keduanya, yang membedakan manusia di sisi Tuhannya hanya ketakwaan, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandungan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan. Ketika perempuan menjadi pemimpin tidak harus berubah warna menjadi seorang laki-laki yang tegas dan berwibawa. Sebab,

⁶¹Agesna, Widya. "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No.1 (2018). h.131.

kepemimpinan juga ideal ketika identik dengan kelemah-lembutan dan kasih-sayang (sesuai tabiat perempuan).⁶²

Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Samsul Zakaria adalah sama-sama mengkaji bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Perbedaannya adalah jurnal ini menganalisis kepemimpinan politik perempuan dalam Islam dengan cara mengkomperasi pemikiran antara KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. Sedangkan, penelitian ini menganalisis kepemimpinan politik perempuan dalam Islam dengan menggunakan metode *mubadalah*.

6. Jurnal karya Erma Yulianis, 2019, yang berjudul “Perspektif Siyasah Dusturiyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrembang Kota Bogor”. Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa implementasi hak perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dari enam kecamatan Kota Bogor hanya tiga diantaranya yang memenuhi *affirmative action* 30%. Rendahnya kesadaran politik dan jiwa sosial apda kaum perempuan merupakan salah satu faktor kendala dalam tidak terpenuhinya *affirmative action* 30% kehadiran perempuan dalam kegiatan Musrembang.⁶³

Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Erma Yulianis adalah menganalisis *affirmative action* yang berisi keterwakilan perempuan dalam jabatan politk. Perbedaannya adalah jurnal ini menganalisis *affirmative action*

⁶²Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)” *Khazanah*, Vol.6, No.1, 2013, h.94.

⁶³Yulianis, Erma. “Perspektif Siyasah Dusturiyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrembang Kota Bogor” *Asy-Syari’ah*, Vol.21, No.1, 2019, h.87.

30% kuota perempuan pada Perda Kota Bogor No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan, penelitian ini menganalisis *affirmative action* 30% kuota perempuan pada UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

7. Jurnal karya Abdul Rahim, 2013, yang berjudul “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender (Analisis Sosiologi Islam)”. Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat stereotipe, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa dengan maupun tidak banyak dilibatkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah : pengaruh faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik, karena semua tugas-tugas yang diembankan kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan. Menurut jurnal ini Perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik di mana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan⁶⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Abdul Rahim adalah sama-sama menganalisis kepemimpinan perempuan dalam jabatan

⁶⁴Rahim, Abdul. “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender (Analisis Sosiologi Islam)” *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, Vol.I, No.1, 2013, h.56.

publik. Perbedaanya adalah jurnal ini menganalisis kepemimpinan perempuan menggunakan perspektif gender, sedangkan penelitian ini menggunakan metode *mubadalah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agesna, Widya. "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Hukum Islam* Vol.III No.1 (2018): 122-132.

Agus, Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Ahdiah, Indah. "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat." *Jurnal Academica* Vol.V No.02 (2013): 85-97.

Akmul, Evi Mulyasari. *Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2014.

Ali Trigiyatno, "Perempuan dan Poligami di Indonesia", *Muwazah*, Vol.3 No.1, 2011, h.335. "Perempuan dan Poligami di Indonesia." *Muwazah* Vol.III No.1 (2011): 325-350.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.

Alimatus Sahrah, "Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan", *Animal, Indonesian Psychological Journal*, Vol.XIX, No.3, (2004), h.222. "Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan." *Indonesian Psychological Journal* Vol.XIX No.3 (2004): 220-235.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.

Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: PT RAJA GRAFINDO, 2017.

Artina, Dessy. "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* Vol.I No.1 (2010): 64-79.

Budiarjo, Mirriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

DA, Ady Thea. *Dilema Sistem Pemilu Serentak*. Jakarta, Indonesia: <https://m.hukumonline.com>, 2019.

Darojatun, Asih. *Kepemimpinan Politik Perempuan Perspektif dalam Perspektif Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Fadli, Yusuf. "Islam, Perempuan dan Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume I Number 1: 56-60.

Gusmansyah, Wery. "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia." *Jurnal Hawa* Vol.I No.1 (2019): 156-172.

Irfan, M. "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 : Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum." *Al- 'Adalah* (UIN Raden Intan Lampung) Volume X Number 3 (2012): 342-352.

Kautun, Ranny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.

Lexy J, Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2007.

M Amin, Tenriawaru Septiananinda Amran, Nuryanti Mustari. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone." *Analisis Sosial Politik* (UIN Muhammadiyah Makassar) Volume 5 Number 1 (2019): 9-19.

Mahfiana, Layyin. "Perempuan dan diskriminasi." *Jurnal Al-'Adl* Vol.VIII No.2 (2015): 110-122.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandangan Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.

Mukarom, Zaenal. "Perempuan dan Politik (studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif." *Jurnal Komunikasi* Volume X Number 3: 50-56.

Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Nugroho, Riant. *Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Pambudi, Muhammad Yusuf. "Perempuan Politik (studi tentang aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di kabupaten Sampang)." *Jurnal Universitas Airlangga* Volume XI Number 2: 70-78.

Power, Nina. *One Dimensional Woman*. UK: Zero Books, 2009.

Ragiliani, Suprpti. *Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rahim, Abdul. "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender (Analisis Sosiologi Islam)." *Equilibrium Jurnal Pendidikan* Vol.I No.1 (2013): 43-58.

Rasyidin. *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Aceh: Unimal Press, 2016.

Robikah, Siti. "Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatima Mernissi." *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* Vol.XXI No.2 (2019): 288-308.

Sakaria, Siti Nimrah dan. "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan)." *Jurnal Magister Ilmu Politik* Volume I Number 2: 70-78.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* Vol. XIII No.2 (2013): 373-394.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

Wardatun, Atun. "Demokratisasi Rumah Tangga: Dari "Subyek" menuju "Sifat" Kepemimpinan." *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. XIV No.2 (2019): 14-27.

Yulianis, Erma. "Perspektif Siyasah Dusturiyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrembang Kota Bogor." *Asy-Syari'ah* Vol.XXI No.1 (2019): 69-90.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)." *Khazanah* Vol. 6 No.1 (2013): 65-97.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Internet:

<https://magdalene.co/story/apedisi-feminis-jati-diri-perempuan-nusantara-dalam-islam-berkeadilan-gender>

<https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>

<https://refrensi.mubadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-san-metode-mubadalah/>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/3>

<http://myzahraadres.blogspot.com/2017/01/peran-domestik-dan-peran-publik.html>

<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perjalanan-panjang-perempuan-dalam-budaya>

